Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman
EQUILIBRIUM
Journal of Economics & Development Studies
E-ISSN: 3026-4472

Vol. 1, No. 2, 2024
e-ISSN: 3026-4472
doi.org/10.30598/Equilibrium.1.2.66-77

PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA JAYAPURA

The Influence of Direct Shopping and Indirect Shopping on the Economic Growth of Jayapura City

Anita Latuheru
STIE Port Numbay, Jayapura, Indonesia
*e-mail Correspondence Author: ithalatuheru@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 24 Januari 2024
Direvisi: 26 Februari 2024
Disetujui: 2 April 2024

Kata Kunci

Pertumbuhan ekonomi; Belanja langsung; Belanja tidak langsung

Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI. Published under Pusat Kajian Ekonomi Kepulauan dan Kemaritiman, FEB Pattimura University. E-ISSN: 3026-4472

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura. Data sekunder berupa data belanja langsung, data belanja tidak langsung dan PDRB Kota Jayapura selama 5 tahun digunakan dalam penelitian ini sekaligus sebagai lokasi penelitian. Adapun metode kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis regresi liner berganda digunakan untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel secara simultan belanja langsung (X1) dan variabel belanja tidak langsung (X2) mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) Kota Jayapura. Secara parsial variabel belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu negara/wilayah diukur berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk provinsi maupun kabupaten/kota (Adisti, 2010; Tambunan, 2016) . PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi selama periode tertentu.

Pada umumnya pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesenambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan

ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyusaian-penyusaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada (Todaro, 2003).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah (Todaro, 2003). Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisitpasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi). Pertumbuhan ekonomi biasanya lebih menunjukkan perubahan yang bersifat kuantitaif yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan perkapita dan biasanya diukur dengan PDRB atau pendapatan perkapita, serta dapat diukur dari sisi masyarakat seperti masyarakat merasakan kepuasan, kenyamanan, merasa aman dan tentram serta merasakan kebahagiaan.

Pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur suatu daerah juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi (Tambunan, 2016). Biaya kegiatan ini disebut pengeluaran pemerintah yang diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Secara umum gambaran pengeluaran publik yaitu infrastruktur dapat mempertinggi pertumbuhan tetapi pengeluaran publik dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah (Adisasmita Rahardjo, 2008).

Perekonomian Kota Jayapura berdasarkan besaran produk domestic regional bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang /jasa yang dihasilkan di wilayah domestic suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekomomi dalam suatu periode tertentu. Apakah factor produksi yang dimiliki residen atau non residen PDRB terbagi menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yang bertujuhan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi Perekonomian Kota Jayapura berdasarkan harga berlaku tahun 2022 sebesar Rp 35,4287 trilun, sedangkan perekonomian menurut harga konstan sebesar Rp 23,703 triliun perekonomian Kota Jayapura pada tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,87 % dari sisi produksi lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,46% dari sisi pengeluaran komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi jika dibanding pertumbuhan ditahun sebelum nya mengalami kontraksi mencapai 3,20% pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura selama lima tahun.

Peranan lapangan usaha tersebut dalam dalam perekonomian Kota Jayapura mencapai 67,95% tersebut naik 3,94 % dibanding tahun 2019, dilihat bahwa PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura dari tahun tahum 2018 mengalami kenaikan. Dari sejak 2020-2021 mengalami penurunan dan 2022 mengalami kenaikan, untuk itu campur tangan pemerintah diperlakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang salah satunya adalah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Perlu juga ditekankan bahwa, pemberlakukan otonomi khusus bagi Propinsi Papua yang merupakan langkah strategis pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam merespon permasalahan pembangunan di Papua yang cenderung lambat. Bahkan, Propinsi Papua hingga saat ini masih dikatagorikan sebagai daeran miskin yang tinggi (Haryanto, 2013; Keban, 1999; Parera, 2023). Padahal, Propinsi Papua memiliki Sumber Daya Alam (SDA) dengan potensi sektor pertambangan dan Kehutananyang melimpah.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah sangat erat kaitan nya dengan pembangunan yang terjadi di pusat maupun di daerah salah satunya adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Dalam pendanaan pembangunan yang terstruktur terdapat belanja yang dilakukan daerah untuk dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat daerah (Fadillah & Sabar, 2023; Ilyas, 2015; Ananda, 2015). Belanja penyelenggaraan urusan wajid diprioritaskan untuk melindungi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Kajian Kaat & Rotinsulu (2019) berpendapat bahwa, pertama, belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutya dalam penelitian yang dilakukan Utami et al (2023) yang bertujuan untuk melihat Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2012-2021. Penelitian tersebut dapat disimpulkan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan berdasarkan secara simultan membuktikan bahwa Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kajian lainnya dilakukan berturut-turut oleh Purnomo et al (2022) di Sulawesi Utara yang menunjukkan bahwa variabel belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel belanja tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan secara bersama-sama variabel belanja tidak langsung dan variabel belanja langsung secara signifikan berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PED). Kuki et al (2023) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan bahwa, belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di NTT baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan temuan-temuan pada kajian sebelumnya di atas, menunjukan bahwa tidak selamanya belanja langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Realita ini dapat disebabkan oleh kemampuan masing-masing daerah yang berbeda untuk mendongkrak pertumbuhan ekonominya. Untuk itu kajian terkait pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura masih memiliki ruang diskusi untuk diperdebatkan. Terlebih lagi Kota Jayapura di Propinsi Papua memiliki keistimewaan tersendiri yang diberikan pemerintah Republik Indonesia termasuk di dalamnya pemberiaan berbagai jenis anggaran pembangunan.

Dengan demikian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2018-2022.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Dimana metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data yang diperhitungkan dan digunakan untuk meneliti penelitian yang empiris di mana data dapat dihitung atau berupa angka (Gujarati, 1999). Penelitian ini dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh Statistik (BPS) Kota Jayapura. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Silalahi, 2017). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, dengan menggunakan data yang diperoleh.

Adapun model persamaannya sebagai berikut:

$$\mathbf{Y=\alpha 0 +\beta 1 X 1 t + \beta 2 X 2 t + e}$$

Dimana:

α0 = Konstanta
$\boldsymbol{\beta 1}$ = Koefisien belanja langsung
$\boldsymbol{\beta 2}$ = Koefisien belanja tidak langsung
$\boldsymbol{X1}$ = Belanja langsung
$\boldsymbol{X}2$ = Belanja tidak langsung
Y = Pertumbuhan ekonomi
e = Error term

HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura

Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah (Rafita et al., 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemampuan pemerintah daerah menggunakan APBD secara ekonomis, efektif dan efisien mutlak dilaksanakan yang tertuang dalam belanda daerah. Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan sehingga pelaksanaan pendanaan urusan pemerintah daerah menjadi kewenangan daerah.

Adapun kewenangan pemerintah daerah terkait urusan pendanaan terbagi atas dua bagian, yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap belanja daerah pada penyusunan APBD yang mulai diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Perubahan tersebut terletak pada komposisi belanja daerah yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah tidak perlu lagi melakukan mapping terhadap komposisi belanja daerah.

Sementara itu, perkembangan belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Jayapura selalu dibarengi dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura belanja langsung, belanja tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Langsung	BelanjaTtidak Langsung
1	2018	5,45	630.934.708.682	677.990.414.598
2	2019	4,49	649.289.319.750	720.107.656.684
3	2020	3,24	659.928.010.867	700.968.032.668
4	2021	3,17	175,768.355.194	1.005.878.281.080
5	2022	3,87	171.289.243.026	1.037.162.387.951

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jayapura, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dana belanja langsung di Kota Jayapura selama limah tahun terhakir fluktuasi di tahun 2018 dana sebesar Rp. 630.934.708.682 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.649.289.319.750 dengan tingkat presentase sebesar 2,9 tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 659.928.010.867 dengan tingkat presentase sebesar 1,6% tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 175,768.355.194 dengan tingkat presentase sebesar 73,3 tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 171.289.243.026 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -2.5 persen.

Perkembangan dana belanja langsung daerah di Kota Jayapura selama lima tahun terakhir fluktuasi di tahun 2018 dana sebesar Rp. 677.990.414.598, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 720.107.656.684 dengan tingkat presentase sebesar 6,21% tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 700.968.032.668 dengan tingkat presentase sebasar 2,65% tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.005.878.281.080 dengan tingkat presentase sebesar 43,4% tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp,1.037.162.387.951 dengan tingkat presentase sebesar 3,11%.
Perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura selama limah tahun terhakir fluktuasi di tahun 2018 pertumbuhan ekonomi meningkat 5,45% tahun 2019 meningkat 4,49% tahun 2020 meningkat 3,24% tahun 2021 meningkat 3,17 % tahun 2022 meningkat dengan 3,87%.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahu pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura tahun 2018-2022. Berikut dibawah ini merupakan hasil perhitungan regresi dengan alat analisis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil uji linier berganda Coefficients

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	75.295	272.689		.276	.808
	Belanja Langsung	.364	2.250	.286	.162	.886
	Belanja Tidak Langsung	-2.934	7.769	-.666	-.378	.742

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari model persamaan menguji pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura yang diperoleh dengan regresi berganda maka model persamaan tersebut yaitu

$$Y = \beta_0 + \beta 1BL + \beta 2BTL + e$$
$$Y = 75.295 + 0{,}364BL - 2.934BTL + e$$

Hal ini dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 75.295, menunjukan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langung sebesar 0 maka pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura akan meningkat sebesar 75.30%
- Nilai koefisien bata pada variabel belanja langsung sebesar 0.364 yang berarti bahwa jika belanja langsung mengalami naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 36.4%.
- Nilai koefisien belanja tidak langung sebesar – 2.934 yang berarti jika belanja tidak langsung mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar – 2.93%.

Tabel 3. Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.950[a]	.903	.806	.405	.903	9.327	2	2	.097	1.788

a. Predictors: (Constant), Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tabel 1.3 diperoleh nilai R Square sebesar 0,903. Hal ini menunjukan bahwa 0,903 atau 90.3% Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 90.3% sedangkan sisanya sebesar 9.7% dapat di jelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura

Kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung diharapkan dapat menanggulangi masalah kemiskinan sehingga angka kemiskinan di Kota Jayapura mampu dikurangi. Pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif, selain kemampuan intervensi lainnya dari pemerintah. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah melalui alokasi belanjanya (Branson, 1989; Kaat & Rotinsulu, 2019; Safitri, 2021).

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1999). Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan "output perkapita". Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992; Safitri, 2021).

Menurut Swan-Solow menganggap output di dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi, dimana laju produksi tahunannya dinyatakan sebagai Y(t) yang menggambarkan pendapatan nyata masyarakat, sebagaian dari padanya dikonsumsi dan sisanya dan sisanya ditabung dan investasikan, bagian yang ditabung S adalah konstan dan laju tabungan adalah Y(t). K(t) adalah stok modal, jadi investasi netto adalah laju kenaikan stok modal ini yaitu dk/dt atau K dengan demikian persamaan pokoknya adalah K = sY. Model Solow dapat menunjukan arah pertumbuhan keadaan mantap serta situasi pertumbuhan jangka panjang yang ditentukan oleh peranan tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang semakin luas, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa model pertumbuhan Solow menunjukan bagaimana pertumbuhan dalam capital stock, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat output, untuk menjelaskan teori pertumbuhan Solow maka pertama akan dianalisis bagaimana peranan stok modal dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi tanpa adanya perkembangan.

Proses pertumbuhan ekonomi dalam keadaan dimana teknologi tidak berkembang, maka tingkat pertumbuhan yang telah dicapai hanya karena adanya perubahan jumlah modal dan jumlah tenaga kerja, hubungan kedua faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan sebagai fungsi produksi, jika jumlah modal naik maka, jumlah output akan meningkat, jika tenaga kerja meningkat, maka jumlah output akan meningkat sebesar marginal product of labour dikalikan pertambahan tenaga kerja, perubahan ini akan lebih realistis apabila kedua faktor produksi ini berubah, yaitu terjadi perubahan modal serta terjadi perubahan jumlah tenaga kerja, kita dapat membagi perubahan ini dalam dua sumber penggunaan marginal products dari dua input: pertama adalah perubahan output yang dihasilkan dari perubahan kapital dan yang kedua adalah perubahan output yang disebabkanoleh adanya perubahan tenaga kerja.

Pertumbuhan *total factor productivity* tidak bisa dilihat secara langsung, maka diukur secara tidak langsung dihitung dengan cara *Total factor productivity* dapat berubah dengan beberapa alasan. Perubahan sering dikaitkan dengan kenaikan pengetahuan pada metode produksi. Solow residual sering juga digunakan untuk mengukur perkembangan tekhnologi. Faktor-faktor produksi seperti pendidikan, regulasi pemerintah dapat mempengaruhi total factor productivity. Sebagai contoh, jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, para pekerja akan menjadi lebih produktif dan output juga akan meningkat, yang mengimplikasikan total *factor productivity* yang lebih besar.

Menurut Harrod-Domar Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh,
b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan,
c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol,
d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = ICOR).

Setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Lincolyn, 2004).

Menganalisis tentang syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap (steady growth). Investasi memberikan peranan kunci dalam prosers pertumbuhan yang disebabkan karena: 1). Investasi dapat menciptakan pendapatan yang merupakan dampak dari penawaran, 2). Investasi dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stock modal yang merupakan dampak dari penawaran. Persamaan model Harrod Domar mencoba menjelaskan bahwa tambahan modal dalam suatu periode t menjadi sumber dasar bagi bertambahnya hasil produksi di periode tertentu (t + 1). Investasi pada saat ini meningkatkan kemampuan produksi dan menambah pendapatan di masa datang. Ilmu makro ekonomi terutama berkaitan dengan perilaku tiga variabel penting, yaitu kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga, dan laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makro ekonomi ditujukan untuk mencapai sasaran bagi ketiga variabel tersebut: penggunaan tenaga kerja penuh, harga yang stabil, dan pertumbuhan yang memuaskan. Penggunaan tenaga kerja penuh dan laju pertumbuhan yang positif jelas akan menunjang kehidupan perekonomian bangsa dan hal itu tidak perlu dipertentangkan lagi. Tetapi meskipun kebanyakan orang sepakat bahwa inflasi itu berbahaya, namun banyak perdebatan sengit mengenai apa sebenarnya yang harus dikhawatirkan dari inflasi.

Menurut (Lestari et al., 2022), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah. Sementara, menurut Rostow dan Musgrave Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perekembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya (Minggu et al., 2019).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perekembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu

terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Menurut Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner menyatakan jika dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman dan Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas

Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Selain itu, Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lainnya (Brata & Arifin, 2003).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah mengubah konsep dan kewenangan daerah yang ada selama ini. Undang-undang ini memiliki makna substansial dalam pemberian kewenangan daerah yang semula ditujukan atas dasar porsi kebijakan pusat yang menonjol dalam pembagian kewenangan pusat-daerah selanjutnya diarahkan menjadi kemandirian daerah dalam mengelola kawasannya termasuk kebijakan-kebijakan pembiayaan. Konsekuensi logis dari hal tersebut berdampak terhadap kemajuan perekonomian daerah yang pada akhirnya terciptanya peningkatan pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu sudah menjadi tuntutan daerah untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Todaro (1999) ada tiga faktor atau komponen utama yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, ketiganya adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Dauhan et al (2020) belanja daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta klasifikasi menurut kelompok belanja, yaitu terdiri dari;
(i) Belanja langsung; belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan, terdiri;

a. Belanja pegawai yang digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,
b. Belanja barang dan jasa yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,

c. Belanja modal/investasi yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk belanja langsung yang ciri spesifiknya adalah investment catagories, dimana penggunaan pembiayaan ini untuk mernbiayai fungsi agent of development dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian. Kondisi keterbatasan pendapatan suatu daerah perlu diupayakan adanya penghematan belanja tidak langsung secara sungguh sungguh, kecuali untuk komponen dana belanja pegawai. Penghematan belanja tidak langsung non pegawai sebaiknya dilakukan rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riil setiap dinas atau kantor. belanja tidak langsung secara umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.

Pengeluaran yang bersifat tidak langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pengeluaran ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat pengeluaran ini merupakan pengeluaran operating catagories dan konsumtif untuk belanja langsung yang ciri spesifiknya adalah investment catagories. Dimana penggunaan pembiayaan ini untuk mernbiayai fungsi agent of development dan dari pengeluaran ini akan menghasilkan kembali produk-produk yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kemajuan tingkat perekonomian (Amaliyah, 2021; Utari, 2017; Tappi, 2011). Kondisi keterbatasan pendapatan suatu daerah perlu diupayakan adanya penghematan belanja tidak langsung secara sungguh-sungguh, kecuali untuk komponen dana belanja pegawai. Penghematan belanja tidak langsung non pegawai sebaiknya dilakukan rasionalisasi belanja yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran untuk pemenuhan kebutuhan riil setiap dinas atau kantor. Belanja tidak langsung secara umum terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lain-lain.

(ii) Belanja tak langsung; merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok biaya tak langsung, dibagi dalam jenis belanja terdiri dari:

a. Belanja pegawai; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pengertian belanja pegawai termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang -undangan,
b. Belanja bunga; digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang,
c. Belanja subsidi; digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa layanan umum masyarakat, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak,
d. Belanja hibah; digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, perusahan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik ditetapkan peruntuknya,
e. Bantuan sosial; digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.
f. Belanja bagi hasil; digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
g. Bantuan keuangan; digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan,
h. Belanja tidak terduga; digunakan untuk menganggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pengeluaran yang bersifat tidak langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Pengeluaran ini mutlak harus dilaksanakan dan sifat pengeluaran ini merupakan pengeluaran operating catagories dan konsumtif. Windhu (2018) dan Tambunan (2016) menyatakan bahwa anggaran belanja pembangunan ini disusun untuk mencerminkan pola kebijaksanaan, prioritas dan program pembangunan untuk setiap anggaran. Sejalan dengan bertambah besamya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan, maka jumlah anggaran pembangunan setiap tahun rnenunjukkan peningkatan. Dari uraian diatas, nampak pentingnya alokasi dana oleh pemerintah melalui pengeluaran yang dilakukan pada sektor bidang pembangunan daerah, manfaat yang diperoleh dari pengalokasian ini adalah mendorong pembangunan daerah dan sisi lain juga menumbuhkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui penyusunan dana ke sektor yang secara potensial ataupun riil memiliki faktor-faktor yang menyebabkan suatu daerah akan cepat berkembang (Ahmada, 2013).

Kemudian hasil regresi yang sudah dilakukan menyatakan bahwa, belanja langsung pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura, dimana belanja langsung sebesar 0.364 yang berarti bahwa jika belanja langsung naik sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 36.4%, dengan semakin meningkatnya anggaran belanja langsung akan berdampak pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura belanja tidak langung sebesar – 2.934 yang berarti jika belanja tidak langsung apa bila mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar – 29.3% yang pada dasarnya akan berdampak pada menurunnya kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan menghambat tercapainya sarana dan tujuan setiap tahap pembangunan dilihat secara parsial belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Parera (2023) yang menyimpulkan bahwa ketika Pemerintah mendorong belanja tidak langsung, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan apabila dua alokasi anggaran ini digabungkan ternyata memberikan hasil yang pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan kata lain secara simultan. Dapat dilihat dari nilai R Square sebesar 0,903. Hal ini menunjukan bahwa 0,903 atau 90.3% Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung bersama-sama menyumbang atau memberi kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 90.3%. Hasil penelitian ini telah didukung oleh teori Keynes dengan rumusan: Y= C+I + G +(X-M), yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah yang dialokasikan sebagai belanja daerah yang disimbolkan sebagai G berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan sebagai Y. Kedua variabel bebas sebagaimana diuraikan di atas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa pengaruh variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura berpengaruh positif, dengan hasil analisi yang bermakna bahwa apabila belanja langsung meningkat maka akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, pengaruh variabel belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura berpengaruh negatif, yang artinya bahwa setiap peningkatan belanja tidak langsung 1 satuan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura.

Dengan melihat hasil penelitian pada variabel belanja langsung dimana benar-benar pemerintah telah mengunakan alokasi belanja langsung secara baik untuk membanguan perekonomian Kota Jayapura, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi kedepan pemerintah harus lebih memperhatikan dan mempertahankan penggunaan anggaran dengan baik. Perlu adanya kajian oleh pemerintah untuk meningkatkan alokasi belanja tidak langsung agar adanya perbaikan dalam pengelolaan belanja tidak langsung, sehinga periode berikutnya ada peningkatan terhadap petumbuhan ekonomi Kota Jayapura. Dengan melihat hasil penelitian secara umum maka, pemerintah Kota Jayapura sudah efisien dalam mengelola belanja dareah sehinga ada penagruh terahadap pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembagian anggaran tidak propesional. Untuk itu harus adanya evaluasi oleh pemerintah dalam bembagian anggaran pada pos-pos yang tepat agar tidak adanya kebocoran anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adila Adisti. (2010). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan ekspor terhadap Kemiskinan di Indonesia* [Universitas Andalas]. http://repo.unand.ac.id/1188/1/IMG.pdf

Adisasmita Rahardjo. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Hasanuddin.

Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Pertama). BPFE – UGM.

Boediono. (1999). *Teori Pertumbuhan Ekonomis seri sinopsis* (Sinopsis). BPFE – UGM.

Branson, W. H. (1989). *Macroeconomic Theory and Policy* (Third). Harper & Row Publisher.

Brata, A. G., & Arifin, Z. (2003). Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia. *Media Ekonomi*, *13*(20), 59–71.

Dauhan, J. S., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. C. (2020). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2008-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *20*(01).

Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, *3*(1 SE-), 25–37. https://doi.org/10.24252/best.v3i1.35390

Gujarati, D. (1999). *Essential of Econometrics* (Second). Mc-Graw Hill.

Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, *2*(3).

Ilyas, I. (2015). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Product Domestik Regional Brutto (Pdrb) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, *Vol 6 No 1 (2015): Edisi Juni 2015*, 1–17. http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/administrasita/article/view/29

Iva Ashari Ananda. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan pada kawasan perbatasan dan non perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, *3*(1).

Kaat, M. H., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010–2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *18*(6).

Keban, Y. T. (1999). Capacity Building sebagai Prakondisi dan Langkah Strategis bagi Perwujudan Otonomi Daerah di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, *3*(2), 67–79. https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8476

Kuki, I. V. D., Munawar, M., & Dheghu, Y. P. (2023). Pengaruh Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JAKA - Jurnal Jurusan Akuntasi; Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit (JAKA)*. http://jurnal.pnk.ac.id/index.php/jaka/article/view/995

Lestari, D., Nainggolan, P., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Inflasi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, *4*(1), 27–36.

Minggu, T. D., Rumate, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung dan investasi swasta terhadap kemiskinan di kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *18*(2), 73–88. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/12793

Nurul Amaliyah. (2021). *Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Parera, J. (2023). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kota Jayapura. *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, *1*(1 SE-Articles). https://doi.org/10.30598/Equilibrium.1.1.15-25

Purnomo, G. D., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*,

22(8), 121–132.

Putra Windhu. (2018). *Tata kelola ekonomi keuangan daerah*. PT Raja Grafindo Persada.

Rafita, R., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2021). Analisis Penyusunan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Studi Kasus Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara). *Journal of Islamic Accounting Competency*, *1*(1), 1–16.

Safitri, M., Ananda, C., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, *6*(2), 85–96. https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339

Silalahi, U. (2017). *Metode penelitian sosial kuantitatif*.

Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.

Tulus Tambunan. (2016). *Pembangunan Ekonomi Inklusif*. LP3ES.

Utami, M. A., Ayu, P., Anwar, S., & Weriantoni, W. (2023). Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2012-2021. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *12*(2), 185–194.

Utari, T. A. P. (2017). *Pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kawasan gerbangkertosusila plus*. University of Muhammadiyah Malang.

Verdi Payung Tappi. (2011). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Jayapura Periode 2001 - 2010*.

Yani Ahmada. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.